



**RENCANA KERJA  
(RENJA)  
DINAS PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA  
KABUPATEN MINAHASA  
TAHUN 2021**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif dan prakiraan maju. Kebijakan Program dan Kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa Tahun 2021 dituangkan dalam Renja Tahun 2021. Sebagai dokumen rencana pembangunan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Minahasa tahun 2018-2023 seperti yang tertuang dalam dokumen perencanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 dengan Visi “ Minahasa maju dalam ekonomi dan budaya,berdaulat adil dan sejahtera” dengan Misi pertama “ Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing dan misi ke empat “ Meningkatkan pemerataan Kesejahteraan yang berkeadilan”

Rencana Kerja (RENJA) ini dimaksudkan sebagai acuan dalam mengoperasionalkan RKPD. Pada RENJA ini digambarkan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam melaksanakan Visi Misi Kabupaten Minahasa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa ditujukan untuk memberikan pelayanan prima secara sistematis dibidang Keluarga Berencana baik dari segi kuantitas maupun dari segi peningkatan kualitas pelayanan serta pemerataan pelaksanaan program Keluarga Berencana yang diberikan kepada masyarakat dengan yang memenuhi standar yang telah ditetapkan baik pelayanan yang bersifat subsidi maupun mandiri sesuai dengan kemampuan masyarakat dan mudah dijangkau.

Pengembangan jaringan organisasi pelayanan KB ditujukan untuk mempercepat proses perubahan pandangan, sikap dan perilaku masyarakat yang positif terhadap program KB,yang selanjutnya harus diikuti dengan perancangan kegiatan operasional serta penyiapan sarana pelayanan yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Pengembangan jaringan pelayanan KB dimaksud, baik yang dikelola oleh Pemerintah, swasta maupun masyarakat itu sendiri.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan program keluarga berencana ditujukan untuk memperkuat dan mengembangkan manajemen/jejaring pelayanan serta kelembagaan program KB disemua tingkatan wilayah. Kuatnya jejaring KB, mantapnya mekanisme operasional yang didukung sistem pencatatan dan pelaporan secara akurat dengan sumberdaya manusia yang handal akan mempercepat perwujudan visi Keluarga Berencana.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang dimaksud dengan Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pemerintah daerah yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja PD merupakan penjabaran operasionalisasi dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) PD yang telah disusun melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya Renja PD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD).

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang relevan dalam penyusunan RENJA PD lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa masing-masing:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Minahasa Tahun 2008 -2028;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor ..... Tahun .... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023.
14. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja Tahun 2021 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa disusun dengan maksud memberikan arah dalam pencapaian sasaran hasil pembangunan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Adapun tujuan Rencana Kerja ini adalah untuk memasukan program/kegiatan yang ada ke dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) Tahun 2021.

Penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa Tahun 2021 berpedoman Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023. Renstra yang berlaku untuk periode lima tahun dijabarkan dalam Renja setiap tahunnya dengan mempertimbangkan isu-isu strategis serta kebutuhan masyarakat yang berkembang. Dalam Renja juga diakomodir masukan yang diperoleh dalam pelaksanaan

musyawarah rencana pembangunan. Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021 diarahkan untuk pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Ketercapaian Visi dan Misi tersebut sangat tergantung pada pelaksanaan kegiatan setiap tahunnya, yang juga akan berpengaruh pada pencapaian pembangunan daerah.

Penyusunan RENJA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa Tahun 2021 dimaksudkan agar para aparatur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki pedoman yang jelas tentang tahapan pembangunan bidang pelayanan Keluarga Berencana di Kabupaten Minahasa pada Tahun Anggaran 2021. Karena itu, pada RENJA 2021 ini terangkum rencana program dan kegiatan, rencana anggaran, dan indikator pencapaian program dan kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan Rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa tahun 2018-2023 ;
2. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun mendatang;
3. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
4. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
5. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan;
6. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan:**

##### **DAFTAR ISI**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang .....

- 1.2 Landasan Hukum .....
- 1.3 Maksud dan Tujuan .....
- 1.4 Sistematika Penulisan .....

**BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MINAHASA TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD .....
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .....
- 3.3 Program dan Kegiatan.....

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**BAB V PENUTUP**

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA)**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
**KABUPATEN MINAHASA TAHUN LALU**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Sebelumnya dan Capaian Renstra SKPD

2.1.1 Evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun 2019

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2021 diperlukan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2019. Evaluasi Renja tahun 2019 dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan PD dimaksud dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan PD. Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa. Renja juga merupakan sebagai alat ukur menilai tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Terkait dengan hal tersebut Rancangan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa selama tahun 2019 dan perkiraan target tahun 2021. Berikut ini adalah Hasil Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanadan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2019 terkait pencapaian target Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN  
PENCAPAIAN RENSTRA SKPD s/d tahun 2020**

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes)/Kegiatan Output)	Target Kinerja capaian program sampai tahun 2023	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran s/d tahun 2018	Tahun 2019			Target program dan kegiatan tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian target sampai dengan Tahun 2020	
					Target	Realisasi	%		Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Tersedianya administrasi kantor yang baik/ Terwujudnya kelancaran operasional dan pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien</b>	<b>1,540,000,000</b>	<b>231,736,937</b>	<b>213,916,500</b>	<b>213,390,600</b>	<b>100%</b>	<b>240,616,000</b>	<b>685,743,537</b>	<b>45%</b>
	Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya barang/jasa penunjang pelayanan administrasi perkantoran		231,736,937	213,916,500	213,390,600	100%	240,616,000	685,743,537	
2	<b>Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Tingkat Pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana aparatur</b>	<b>5,706,000,000</b>	<b>676,901,681</b>	<b>1,172,350,000</b>	<b>1,131,220,446</b>	<b>96%</b>	<b>1,317,184,000</b>	<b>3,125,306,127</b>	<b>55%</b>
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Terlaksananya Pengadaan Sepeda Motor			600,000,000	577,200,000	96%		577,200,000	
		Terlaksananya Pengadaan mobil Distribusi Alokon			-				350,000,000	350,000,000
	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Peralatan /perlengkapan gedung kantor		56,979,000	54,500,000	54,211,000	99%	12,500,000	123,690,000	



Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya service kendaraan, penggantian suku cadang dan pajak kendaraan		50,735,731	39,000,000	39,000,000	100%	74,684,000	164,419,731	
Pembangunan Gedung Kantor Balai Penyuluhan KB (DAK)	Tersedianya Pembangunan Gedung Kantor Balai Penyuluhan KB di Kec. Kakas barat		15,219,950	371,350,000	361,343,446	100%		376,563,396	
	Tersedianya Pembangunan Gedung Kantor Balai Penyuluhan KB di Kec. Remboken		354,250,000	371,350,000	361,343,446	100%		715,593,446	
	Tersedianya Pembangunan Gedung Kantor Balai Penyuluhan KB di Kec. Kombi			371,350,000	361,343,446	100%		361,343,446	
	Tersedianya Pembangunan Gedung Kantor Balai Penyuluhan KB di Kec. Langowan Timur			371,350,000	361,343,446	100%	380,000,000	741,343,446	
	Tersedianya Pembangunan Gedung Kantor Balai Penyuluhan KB di Kec. Tombariri Timur			371,350,000	361,343,446	100%	380,000,000	741,343,446	
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor (Media/alat Pengolah Data (DAK))	Tersedianya peralatan dan perlengkapan Pendataan			7,500,000	-	0%	120,000,000	120,000,000	
Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Tersedianya Gedung Kantor yang representatif di Kec. Tondano Barat		199,717,000	50,000,000	49,716,000	99%		249,433,000	
Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Balai Penyuluhan KB	Tersedianya Gedung Kantor yang representatif di Kec. Tondano Barat			50,000,000	49,716,000	99%		49,716,000	

		Tersedianya Gedung Kantor yang representatif di Kec. Tondano Utara			50,000,000	49,750,000	100%		49,750,000	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Presentase kehadiran pegawai sesuai jam kerja	230,000,000	33,830,400	35,000,000	35,000,000	100%	17,500,000	86,330,400	38%
		Tingkat disiplin kehadiran pegawai pada kegiatan khusus serta hari-hari raya tertentu								
	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian		33,830,400	35,000,000	35,000,000	100%	17,500,000	86,330,400	
4	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pejabat yang memiliki tanda lulus diklat penjenjangan struktural	64,000,000							0%
		Persentase pejabat yang memiliki tanda lulus pembekalan pelaksanaan tugas								
	Keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan pimpinan Tingkay IV, III, dan II, pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan Peningkatan kapasitas aparatur	Peningkatan pengetahuan dan pendidikan aparatur								
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kerja dan keuangan	Cakupan Laporan capaian kinerja keuangan yang tersedia tepat waktu	64,000,000					3,000,000	3,000,000	5%

	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja						1,500,000	1,500,000	
	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun						1,500,000	1,500,000	
6	<b>Program perencanaan perangkat daerah</b>	<b>Jumlah dokumen perangkat daerah yang ditetapkan</b>	<b>15,000,000</b>							<b>0%</b>
	Penyusunan rencana perangkat daerah	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun								
7	<b>Program Keluarga Berencana</b>	<b>Rata-rata jumlah anak per keluarga</b>	<b>2,933,000,000</b>	<b>375,125,000</b>	<b>216,501,000</b>	<b>215,473,900</b>	<b>100%</b>	<b>387,883,000</b>	<b>978,481,900</b>	<b>33%</b>
		<b>Total Fertility Rate (TFR)</b>								
	Promosi pelayanan Khiba	Terlaksananya penyuluhan KHIBA		41,250,000	41,250,000	40,627,500	98%		81,877,500	
	Pembinaan Keluarga Berencana	Turut serta kegiatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS)		184,375,000	175,251,000	174,846,400	100%	369,333,000	728,554,400	
	Grand desain pembangunan kependudukan	Tersedianya dokumen RAD kependudukan		149,500,000					149,500,000	
	Kegiatan rencana aksi daerah									
	Kajian kependudukan	Tersedianya dokumen kajian kependudukan								
	Penyediaan dokumen data rumah dataku di kampung KB	Tersedianya dokumen data di kampung KB						9,100,000	9,100,000	

	Pembentukan dan Fasilitas sekolah siaga kependudukan serta pojok kependudukan	Terbentuknya fasilitas sekolah siaga kependudukan serta pojok kependudukan								
8	<b>Program kesehatan reproduksi remaja</b>	<b>Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)</b>	<b>303,000,000</b>	<b>45,759,500</b>	<b>45,057,500</b>	<b>44,924,500</b>	<b>100%</b>	<b>25,000,000</b>	<b>115,684,000</b>	<b>38%</b>
		<b>Presentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)</b>								
	Sosialisasi tentang masalah reproduksi remaja	Terlaksananya Tentang Masalah Reproduksi Remaja (Pubertas)		45,759,500	45,057,500	44,924,500	100%	25,000,000	115,684,000	
9	<b>Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga</b>	<b>Rasio petugas pendamping bina keluarga</b>	<b>208,000,000</b>	<b>45,202,500</b>				<b>25,000,000</b>	<b>70,202,500</b>	<b>34%</b>
	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga dikecamatan	Terlaksananya pelatihan tenaga pendamping di kelompok bina keluarga		45,202,500				25,000,000	70,202,500	
10	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana fisik pelayanan KB serta PEMERATAAN AKSES PELAYANAN kb YANG BERKUALITAS</b>	<b>Angka pemakaian kontrasepsi /CPR bagi perempuan menikah usia 15-49</b>	<b>1,189,000,000</b>		<b>68,150,000</b>	<b>68,150,000</b>	<b>100%</b>	<b>210,276,000</b>	<b>278,426,000</b>	<b>23%</b>

	Pengadaan PKB/PLKB kit dan KIE kit	Terlaksananya pengadaan PKB/PLKB kit dan KIE kit			68,150,000	68,150,000	100%	139,500,000	207,650,000	
	Pengadaan sarana PPKBD	Terlaksananya pengadaan PPKBD/Sub PPKBD Kit						36,000,000	36,000,000	
	Pengadaan sarana dan prasarana rumah data kependudukan percontohan	Terlaksananya pengadaan rumah data kependudukan						34,776,000	34,776,000	
11	<b>Program BOKB</b>	<b>Cakupan peserta KB aktif</b>								
		<b>Rasio akseptor KB</b>	<b>38,457,000,000</b>	<b>4,679,440,000</b>	<b>6,230,975,000</b>	<b>5,991,194,000</b>	<b>96%</b>	<b>6,728,974,000</b>	<b>17,399,608,000</b>	<b>45%</b>
		<b>Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi</b>								
	BOKB balai penyuluhan KB Kecamatan Tondano Timur	Terlaksananya operasional balai penyuluhan KB		373,055,000	195,550,000	191,730,000	98%	199,957,500	764,742,500	
	BOKB balai penyuluhan KB Kecamatan Tondano Barat	Terlaksananya operasional balai penyuluhan KB		373,055,000	195,550,000	189,230,000	97%	199,957,500	762,242,500	
	BOKB balai penyuluhan KB Kecamatan Tondano Utara	Terlaksananya operasional balai penyuluhan KB		372,005,000	195,550,000	189,230,000	97%	199,957,500	761,192,500	
	BOKB balai penyuluhan KB Kecamatan Tondano Selatan	Terlaksananya operasional balai penyuluhan KB		372,005,000	195,550,000	191,230,000	98%	199,957,500	763,192,500	
	BOKB balai penyuluhan KB Kecamatan Langowan Barat	Terlaksananya operasional balai penyuluhan KB		372,005,000	195,550,000	192,230,000	98%	199,957,500	764,192,500	

BOKB balai penyuluhan KB Kecamatan Kawangkoan	Terlaksananya operasional balai penyuluhan KB		281,537,500	195,550,000	188,530,000	96%	199,957,500	670,025,000	
BOKB balai penyuluhan KB Kecamatan Kawangkoan Utara	Terlaksananya operasional balai penyuluhan KB		281,537,500	195,550,000	192,730,000	99%	199,957,500	674,225,000	
BOKB balai penyuluhan KB Kecamatan Tompaso Barat	Terlaksananya operasional balai penyuluhan KB		280,477,500	195,550,000	188,530,000	96%	199,957,500	668,965,000	
BOKB Balai Penyuluhan KB Kecamatan Kakas	Terlaksananya operasional balai penyuluhan KB		281,537,500	195,550,000	185,639,500	95%	199,957,500	667,134,500	
BOKB Balai Penyuluhan KB Kecamatan Lembean Timur	Terlaksananya operasional balai penyuluhan KB		281,537,500	195,550,000	195,530,500	100%	199,957,500	677,025,500	
BOKB Balai Penyuluhan KB Kecamatan Eris	Terlaksananya operasional balai penyuluhan KB		281,537,500	195,550,000	189,419,500	97%	199,957,500	670,914,500	
BOKB Balai Penyuluhan KB Kecamatan Tombulu	Terlaksananya operasional balai penyuluhan KB		281,537,500	195,550,000	190,289,500	97%	199,957,500	671,784,500	
BOKB Balai Penyuluhan KB Kecamatan Kakas Barat	Terlaksananya operasional balai penyuluhan KB		281,537,500	195,550,000	186,630,000	95%	199,957,500	668,125,000	
BOKB Balai Penyuluhan KB Kecamatan Langowan Utara	Terlaksananya operasional balai penyuluhan KB		281,537,500	195,550,000	192,730,000	99%	199,957,500	674,225,000	
BOKB Balai Penyuluhan KB Kecamatan Kawangkoan Barat	Terlaksananya operasional balai penyuluhan KB		281,537,500	195,550,000	188,530,000	96%	199,957,500	670,025,000	

BOKB Balai Penyuluhan KB Kecamatan Remboken	Terlaksananya operasional balai penyuluhan KB			195,550,000	188,307,000	96%	199,957,500	388,264,500	
BOKB Balai Penyuluhan KB Kecamatan Mandolang	Terlaksananya operasional balai penyuluhan KB			195,550,000	190,478,000	97%	199,957,500	390,435,500	
BOKB Balai Penyuluhan KB Kecamatan Kombi	Terlaksananya operasional balai penyuluhan KB						199,957,500	199,957,500	
Dukungan KIE dan Manajemen	Terlaksananya Dukungan Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Manajemen			49,885,000	-	0%	239,049,500	239,049,500	
BOKB Kampung KB Kecamatan Langowan Selatan	Terlaksananya operasional balai penyuluhan KB			105,550,000	102,300,000	97%	108,202,500	210,502,500	
BOKB Kampung KB Kecamatan Langowan Timur	Terlaksananya operasional balai penyuluhan KB			105,550,000	98,900,000	94%	108,202,500	207,102,500	
BOKB Kampung KB Kecamatan Tompaso	Terlaksananya operasional balai penyuluhan KB			105,550,000	101,300,000	96%	108,202,500	209,502,500	
BOKB Kampung KB Kecamatan Tombariri	Terlaksananya operasional balai penyuluhan KB			105,550,000	102,300,000	97%	108,202,500	210,502,500	
BOKB Kampung KB Kecamatan Tombariri Timur	Terlaksananya operasional balai penyuluhan KB			105,550,000	100,500,000	95%	108,202,500	208,702,500	
BOKB Kampung KB Kecamatan Pineleng	Terlaksananya operasional balai penyuluhan KB			105,550,000	103,300,000	98%	108,202,500	211,502,500	
BOKB Kampung KB Kecamatan Sonder	Terlaksananya operasional balai penyuluhan KB			105,550,000	105,300,000	100%	108,202,500	213,502,500	

BOKB Kampung KB Kecamatan Kombi	Terlaksananya operasional balai penyuluhan KB			105,550,000	105,300,000	100%		105,300,000	
Distribusi alat obat kontrasepsi (Alokon)	Terlaksananya Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi (ALOKON)		3,000,000	68,340,000	-	0%	92,072,000	95,072,000	
Pembinaan program KB bagi masyarakat oleh kader (PPKBD dan Sub PPKBD)	Terlaksananya Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat Oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD)			1,944,000,000	1,944,000,000	100%	2,041,200,000	3,985,200,000	

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Untuk menganalisis tingkat keberhasilan dan kegagalan dapat dilihat sejauh mana strategi pencapaian sasaran berupa kebijakan yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program-program yang menjadi tolok ukur pada Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan Keluarga Berencana.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan  
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana  
Kabupaten Minahasa

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
1	Rasio Akseptor KB	77%	77%	77%	78%	77%	77%	77%	78%	
2	Angka Pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	



3	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	25,07%	25,91%	26%	27,01%	25,07%	25,91%	26%	27,01%	
4	Total Fertility Rate (TFR)	2,06	2,08	2,08	2,09	2,06	2,06	2,08	2,08	
5	Cakupan ketersediaan dan distribusi alokon	81,50%	83%	84%	85%	81,50%	83%	84%	85%	
6	Tingkat putus pakai kontrasepsi (DO)	512 org	462 org	413 org	367 org	512 org	462 org	413 org	367 org	
7	Angka Kelahiran remaja perempuan usia (15-19) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	34	32	30	28	34	32	30	28	
8	Persentase remaja yang terkena Infeksi menular seksual (IMS)	0,25	0,2	0,1	0,09	0,25	0,2	0,1	0,09	
9	Cakupan remaja dalam PIK R/M	81%	84%	86%	88%	81%	84%	86%	88%	
10	Cakupan anggota BKL ber KB	91,83%	92%	93%	94%	91,83%	92%	93%	94%	
11	Cakupan anggota BKR ber KB	88,8%	90%	91%	92%	88,8%	90%	91%	92%	
12	Cakupan anggota BKB ber KB	91,52%	92%	93%	94%	91,52%	92%	93%	94%	

13	Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber KB mandiri	26%	29%	30%	32,20%	26%	29%	30%	32,20%	
14	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	10%	20%	20%	20%	10%	20%	20%	20%	
15	Rasio petugas pendamping bina keluarga	0	1,8	1,35	1,1	0	1,8	1,35	1,1	
16	Pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) disetiap kecamatan	16	17	18	19	16	17	18	19	
17	Angka Pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	
18	Usia kawin pertama(UKP)	8,8%	8,3%	7,9%	7,5%	8,8%	8,3%	7,9%	7,5%	
19	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,02	1,01	1,01	1,01	1,02	1,01	1,01	1,01	
20	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	2	2	2	2	2	2	2	
21	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap Desa	35%	70%	90%	95%	35%	70%	90%	95%	
22	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	4	10	15	20	4	10	15	20	

23	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan	31	40	51	65	31	40	51	65	
24	Rasio PPKBD setiap Desa/Kelurahan	270	270	270	270	270	270	270	270	
25	Rasio Akseptor KB	77%	77%	77%	78%	77%	77%	77%	78%	
26	Cakupan Peserta KB aktif	77%	77%	78%	78%	77%	77%	78%	78%	
27	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	8,31	8,06	7,82	7,59	8,31	8,06	7,82	7,59	

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

#### A. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi SKPD

Hasil analisis isu strategis selanjutnya dipadukandengan batasan tugas dan peran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa makahambatan dan masalahyang dihadapi adalahsebagai berikut :

Tabel. 2.3.1 Hambatan dan Masalah

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (Kewenangan SKPD)	EKSTERNAL (Diluar Kewenangan SKPD)	
Jumlah Balai Penyuluhan KB Kecamatan	72%	Persentase Balai Penyuluhan KB Kecamatan yang beroperasi aktif			- Belum semua kecamatan memiliki Balai Penyuluhan KB
Perbandingan jumlah petugas Lapangan KB (PLKB) dengan luas wilayah pelayanan		Jumlah Peserta KB Aktif		Ratio Petugas PLKB dan PKB	- Luas Wilayah pelayanan yang tidak sesuai dengan jumlah petugas PLKB dan PKB di Lapangan (1 :20) 1 petugas lapangan melayani 20 desa (jumlah PLKB 13 orang dari 270 desa)
Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Program			Kurangnya komitmen dan dukungan dari		(1) Masih lemahnya komitmen dan dukungan para pemangku kepentingan terhadap program KKBPK terutama yang

<p>Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) pelaksanaannya masih dihadapkan dengan beberapa permasalahan</p>			<p>pemangku kepentingan</p>		<p>terkait kebijakan, perencanaan program dan penganggaran; (2) Masih terjadinya kesenjangan dalam memperoleh informasi tentang program KKBPK baik antar Kecamatan, Kelurahan/desa (4) Muatan dan pesan dalam advokasi dan KIE masih perlu untuk terus dikembangkan; (5) Peran Tenaga lapangan KB/PLKB dalam konseling KB belum optimal.</p>
<p>Pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga dalam upaya mengendalikan jumlah kelahiran dan menurunkan resiko kematian Ibu melahirkan</p>					<p>(1) Angka kelahiran pada perempuan usia 15-19 tahun masih tinggi; (2) Masih banyaknya perkawinan usia muda; (3) Tingginya perilaku seks pra nikah disebagian kalangan remaja, berakibat pada kehamilan yang tidak diinginkan masih tinggi; (4) Pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku beresiko masih rendah.</p>
<p>Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui</p>					<p>(1) Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi</p>

<p>pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB masih dihadapkan pada beberapa permasalahan</p>					<p>dan konseling ketahanan dan kesejahteraan keluarga; (2) Pelaksanaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga akan peran dan fungsi kelompok kegiatan belum optimal dalam mendukung pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB. Disamping itu, kelompok kegiatan (Poktan), yang terdiri dari: Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) belum optimal dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat akan pentingnya berKB/pelestarian Peserta KB Aktif (PA); (3) Terbatasnya materi program KKBPK dalam kelompok kegiatan serta terbatasnya jumlah dan kualitas kader/tenaga kelompok kegiatan.</p>
<p>-Pelaksanaan Tugas-tugas Kantor  -Keberhasilan Program KKBPK</p>					<p>Dengan banyaknya tugas-tugas yang dilaksanakan pada Dinas Pengendalian penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa diperlukan</p>

					<p>Pegawai-pegawai yang profesional dan proporsional dalam melaksanakan tugasnya dan berpengalaman untuk mencapai kelancaran Tugas Dinas</p> <p>b. Penempatan pegawai yang kurang sesuai dengan kompetensi atau dengan bidang tugasnya. Dan seluruh pegawai diharapkan memahami Tupoksi sehingga dapat mengimplementasikannya dalam pekerjaan sehari-hari.</p>
--	--	--	--	--	--

### B. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan SKPD

Faktor kunci keberhasilan dari suatu organisasi pemerintah atau instansi, tergantung kepada sumber daya-sumber daya yang dimilikinya dan juga dukungan dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang melingkupinya. Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan menjadi landasan kritis dalam merancang strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa.

Tabel. 2.3.2 Tantangan dan Peluang

PERMASALAHAN	TANTANGAN	PELUANG
Luas Wilayah Garapan yang tidak Sesuai dengan Jumlah Petugas PLKB di Lapangan (1 : 20)	Keterbatasan / Kurangnya tenaga Penyuluh KB dilapangan sehingga perlu penambahan pegawai sebagai Tenaga Lapangan	-Menanggulangi kekurangan PLKB dengan PLKB non PNS -Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, serta optimalisasi fungsi PPKBD dan Sub-PPKBD (Kader) sebagai ujung tombak pelaksanaan Program KKBPK di lini lapangan.
Banyaknya kelompok kegiatan bagi peningkatan ketahanan keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melalui UPPKS ( Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera ) yang	Kurangnya Melakukan pelatihan dan pendampingan kelompok TriBina dan UPPKS	- Adanya upaya kemitraan dengan stakeholder terkait -Memanfaatkan Dana DAK Non Fisik (BOKB)



<p>memerlukan pendampingan kelompok dan pelaitan</p>		
<p>Tupoksi Pegawai</p>	<p>Dalam Penyelenggaraan tugas-tugas dilihat dari unsur penunjang yang ada yaitu unsur Sumber Daya Manusia ( SDM ) Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kab. minahasa kalau dilihat dari segi Profesional dan Proporsional dirasakan masih kurang didalam melaksanakan tugasnya dikarenakan keterbatasan pegawai dan kurangnya pemahaman pegawai tentang TUPOKSI.</p>	<p>Penambahan Pegawai</p>

Dari tabel hambatan dan masalah serta tantangan dan peluang dapat ditentukan isu-isu penting yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas dalam meningkatkan tingkat kesertaan ber-KB dan pengendalian penduduk di tahun 2021 antara lain melalui:

- 1) Ketersediaan instrumen regulasi yang mendukung penguatan program dan kegiatan Pembangunan Bidang Kependudukan dan KB ke dalam program dan kegiatan Pemerintah Daerah;
- 2) Ketersediaan rancang bangun program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang tertuang dalam Arah Kebijakan Umum Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Daerah, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten);
- 3) Penguatan Kelembagaan Pengendalian Penduduk dan KB di Tingkat Kabupaten;
- 4) Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota, serta optimalisasi fungsi PPKBD dan Sub-PPKBD (Kader) sebagai ujung tombak pelaksanaan Program KKBPK di lini lapangan.
- 5) Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi melalui kegiatan prioritas :
  1. Pelayanan KB;
  2. Advokasi dan KIE KKBPK;
  3. Pembinaan Remaja;
  4. Pembangunan Keluarga
  5. Regulasi, Kelembagaan serta Data dan Informasi.
  6. Adanya sumber daya manusia (SDM) aparatur yang memadai baik di tingkat Kabupaten dan Kecamatan (PKB/PLKB)
  7. Jejaring kemitraan lintas sektoral

#### 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Hasil analisis kebutuhan terdapat perubahan terhadap rancangan awal RKPD. Rancangan awal tidak memenuhi Bantuan operasional keluarga berencana (BOKB) dan pengadaan sarana dan prasarana program KB bagi PKB/PLKB yang berperan penting dalam sasaran strategis meningkatkan tingkat kesertaan ber-KB, sehingga atas hal tersebut dalam hasil analisis bantuan operasional keluarga berencana (BOKB) dan pengadaan sarana dan prasarana program KB bagi PKB/PLKB di tambahkan sebagaimana table berikut:

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Juta Rp	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Juta Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	DPPKB	Persentase pengelolaan kegiatan, keuangan, barang, aset dan kepegawaian yang di dukung administrasi yang baik	97%	314	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	DPPKB	Persentase pengelolaan kegiatan, keuangan, barang, aset dan kepegawaian yang di dukung administrasi yang baik	97%	314	
	Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	DPPKB	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	97%	314	Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	DPPKB	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	97%	314	
2	<b>PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	DPPKB	Persentase ketersediaan prasarana sarana aparatur sesuai rencna kebutuhan barang milik(RKBM)	85%	1139	<b>PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	DPPKB	Persentase ketersediaan prasarana sarana aparatur sesuai rencna kebutuhan barang milik(RKBM)	85%	1139	
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung(DAK)	DPPKB	Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor	4 Unit	130	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung(DAK)	DPPKB	Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor	4 Unit	130	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	DPPKB	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	5 Unit	62	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	DPPKB	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	5 Unit	62	

	Rehabilitasi sedang berat gedung balai Penyuluhan KB (DAK)	DPPKB	Terpenuhinya gedung balai penyuluhan KB yang lebih baik	1 Paket	60	Rehabilitasi sedang berat gedung balai Penyuluhan KB (DAK)	DPPKB	Terpenuhinya gedung balai penyuluhan KB yang lebih baik	1 Paket	60	
	Rehabilitasi sedang berat gedung kantor (DAK)	DPPKB	Terpenuhinya gedung kaantor yang lebih baik	2 Paket	110	Rehabilitasi sedang berat gedung kantor (DAK)	DPPKB	Terpenuhinya gedung kaantor yang lebih baik	2 Paket	110	
	Pembangunan gedung kantor balai penyuluhan KB(DAK)	DPPKB	Terlaksananya pembangunan balai penyuluhan KB di setiap kecamatan	2	780	Pembangunan gedung kantor balai penyuluhan KB(DAK)	DPPKB	Terlaksananya pembangunan balai penyuluhan KB di setiap kecamatan	2	780	
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARTUR	DPPKB	Presentase kehadiran pegawai sesuai jam kerja	96%	46	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARTUR	DPPKB	Presentase kehadiran pegawai sesuai jam kerja	96%	46	
			Persentase kehadiran pegawai pada kegiatan khusus serta hari-hari tertentu	97%				Persentase kehadiran pegawai pada kegiatan khusus serta hari-hari tertentu	97%		
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	DPPKB	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	35 Paket	35	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	DPPKB	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	35 Paket	35	
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Badan Diklat Propinsi	Persentase pejabat yang memiliki tanda lulus diklat penjenjangan struktural	25%	16	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Badan Diklat Propinsi	Persentase pejabat yang memiliki tanda lulus diklat penjenjangan struktural	25%	16	
			Persentase pejabat yang memiliki tanda lulus pembekalan pelaksanaan tugas teknis	35%				Persentase pejabat yang memiliki tanda lulus	35%		
	Pendidikan dan latihan PIM IV	Badan Diklat Propinsi	Jumlah pejabat yang mengikuti diklat penjenjangan PIM IV	1 Org	16	Pendidikan dan latihan PIM IV	Badan Diklat Propinsi	Jumlah pejabat yang mengikuti diklat penjenjangan PIM IV	1 Org	16	

5	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KERJA DAN KEUANGAN</b>	DPPKB	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersedia tepat waktu	100%	16	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KERJA DAN KEUANGAN</b>	DPPKB	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersedia tepat waktu	100%	16	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan	Dinas PP dan KB	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan	1 Keg	4	Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan	Dinas PP dan KB	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan	1 Keg	4	
	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	DPPKB	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	1 Keg	4	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	DPPKB	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	1 Keg	4	
6	<b>PROGRAM PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	DPPKB	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah yang ditetapkan	3 dok	5	<b>PROGRAM PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	DPPKB	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah yang ditetapkan	4 dok	5	
	Penyusunan renstra dan renja	DPPKB	Tersusunnya Renstra dan Renja	2 Dok	3	Penyusunan renstra dan renja	DPPKB	Tersusunnya Renstra dan Renja	2 Dok	3	
7	<b>PROGRAM KELUARGA BERENCANA</b>	Kecamatan	Rata-rata jumlah anak perkeluarga	2,04	605	<b>PROGRAM KELUARGA BERENCANA</b>	Kecamatan	Rata-rata jumlah anak perkeluarga	2,04	605	
			Total Fertility rate (TFR)	2,08				Total Fertility rate (TFR)	2,08		
	Promosi pelayanan Khiba	Kecamatan	Terlaksananya kegiatan promosi Khiba	1 Keg	45	Promosi pelayanan Khiba	Kecamatan	Terlaksananya kegiatan promosi Khiba	1 Keg	45	
	Hari keluarga nasional	Kecamatan	Mengikuti kegiatan hari keluarga nasional	1 Keg	375	Hari keluarga nasional	Kecamatan	Mengikuti kegiatan hari keluarga nasional	1 Keg	375	

	Pembentukan rumah data kependudukan dikampung KB	Kecamatan	Tersedianya kependudukan dikampung KB	3 kampung	15	Pembentukan rumah data kependudukan dikampung KB	Kecamatan	Tersedianya kependudukan dikampung KB	3 kampung	15	
	Pembentukan sekolah siaga kependudukan serta pojok kependudukan	Kecamatan	Terbentuknya fasilitas sekolah siaga dan pojok kependudukan tiap kecamatan	3 sekolah	15	Pembentukan sekolah siaga kependudukan serta pojok kependudukan	Kecamatan	Terbentuknya fasilitas sekolah siaga dan pojok kependudukan tiap kecamatan	3 sekolah	15	
8	<b>PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA</b>	Kecamatan	<b>Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun)</b>	30	61	<b>PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA</b>	Kecamatan	<b>Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun)</b>	30	61	
			<b>Persentase remaja yang terkena infeksi menular seksual</b>	0,1				<b>Persentase remaja yang terkena infeksi menular seksual</b>	0,1		
	Sosialisasi tentang masalah reproduksi remaja	Kecamatan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi masalah reproduksi remaja	1 Keg	30	Sosialisasi tentang masalah reproduksi remaja	Kecamatan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi masalah reproduksi remaja	1 Keg	30	
9	<b>PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA</b>	DPPKB	<b>Rasio petugas pendamping bina keluarga</b>	1,35	60	<b>PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA</b>	DPPKB	<b>Rasio petugas pendamping bina keluarga</b>	1,35	60	
			<b>Terlaksananya pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga</b>	800 Org				<b>Terlaksananya pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga</b>	800 Org		
	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Kecamatan	terlaksananya pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	800 Org	60	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Kecamatan	terlaksananya pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	800 Org	60	

10	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA FISIK PELAYANAN KB SERTA PEMERATAAN AKSES KB YANG BERKUALITAS</b>	Kecamatan	Angka pemakaian kontrasepsi /CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	0,4%	261	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA FISIK PELAYANAN KB SERTA PEMERATAAN AKSES KB YANG BERKUALITAS</b>	Kecamatan	Angka pemakaian kontrasepsi /CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	0,4%	261	
	Pengadaan sarana PPKBD(DAK)	Kecamatan	Terlaksananya pengadaan sarana PPKBD (DAK)	30 Paket	150	Pengadaan sarana PPKBD(DAK)	Kecamatan	Terlaksananya pengadaan sarana PPKBD (DAK)	30 Paket	150	
	Pengadaan PKB/PLKB kit dan KIE kit (DAK)	Kecamatan	Terlaksananya pengadaan PKB/PLKB Kit dan KIE Kit (DAK)	8 paket	40	Pengadaan PKB/PLKB kit dan KIE kit (DAK)	Kecamatan	Terlaksananya pengadaan PKB/PLKB Kit dan KIE Kit (DAK)	8 paket	40	
	Pengadaan sarana dan prasarana rumah data kependudukan	Kecamatan	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana rumah data kependudukan	4 unit	54	Pengadaan sarana dan prasarana rumah data kependudukan	Kecamatan	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana rumah data kependudukan	4 unit	54	
11	<b>PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA (BOKB)</b>	Kecamatan	<b>Cakupan Peserta KB Aktif</b>	<b>77%</b>	<b>7.489</b>	<b>PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA (BOKB)</b>	Kecamatan	<b>Cakupan Peserta KB Aktif</b>	<b>77%</b>	<b>7.489</b>	
			<b>Rasio Akseptor KB</b>	<b>77%</b>				<b>Rasio Akseptor KB</b>	<b>77%</b>		
			<b>Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi</b>	<b>8,06%</b>				<b>Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi</b>	<b>8,06%</b>		
	BOKB balai penyuluhan KB kec. Tondano Timur	Kecamatan	Terpeliharanya balai KB dan peningkatan kemampuan penyuluh KB	1 Keg	205	BOKB balai penyuluhan KB kec. Tondano Timur	Kecamatan	Terpeliharanya balai KB dan peningkatan kemampuan penyuluh KB	1 Keg	205	
	BOKB balai penyuluhan KB kec. Tondano Barat	Kecamatan	Terpeliharanya balai KB dan peningkatan kemampuan penyuluh KB	1 keg	205	BOKB balai penyuluhan KB kec. Tondano Barat	Kecamatan	Terpeliharanya balai KB dan peningkatan kemampuan penyuluh KB	1 keg	205	

	BOKB balai penyuluhan KB kec. Tondano Utara	Kecamatan	Terpeliharanya balai KB dan peningkatan kemampuan penyuluh KB	1 Keg	205	BOKB balai penyuluhan KB kec. Tondano Utara	Kecamatan	Terpeliharanya balai KB dan peningkatan kemampuan penyuluh KB	1 Keg	205	
	BOKB balai penyuluhan KB kec. Tondano Selatan	Kecamatan	Terpeliharanya balai KB dan peningkatan kemampuan penyuluh KB	1 Keg	205	BOKB balai penyuluhan KB kec. Tondano Selatan	Kecamatan	Terpeliharanya balai KB dan peningkatan kemampuan penyuluh KB	1 Keg	205	
	BOKB balai penyuluhan KB kec. Langowan Barat	Kecamatan	Terpeliharanya balai KB dan peningkatan kemampuan penyuluh KB	1 Keg	205	BOKB balai penyuluhan KB kec. Langowan Barat	Kecamatan	Terpeliharanya balai KB dan peningkatan kemampuan penyuluh KB	1 Keg	205	
	BOKB balai penyuluhan KB kec. Kawangkoan	Kecamatan	Terpeliharanya balai KB dan peningkatan kemampuan penyuluh KB	1 Keg	205	BOKB balai penyuluhan KB kec. Kawangkoan	Kecamatan	Terpeliharanya balai KB dan peningkatan kemampuan penyuluh KB	1 Keg	205	
	BOKB balai penyuluhan KB kec. Kawangkoan Utara	Kecamatan	Terpeliharanya balai KB dan peningkatan kemampuan penyuluh KB	1 Keg	205	BOKB balai penyuluhan KB kec. Kawangkoan Utara	Kecamatan	Terpeliharanya balai KB dan peningkatan kemampuan penyuluh KB	1 Keg	205	
	BOKB balai penyuluhan KB kec. Tompaso Barat	Kecamatan	Terpeliharanya balai KB dan peningkatan kemampuan penyuluh KB	1 Keg	205.00	BOKB balai penyuluhan KB kec. Tompaso Barat	Kecamatan	Terpeliharanya balai KB dan peningkatan kemampuan penyuluh KB	1 Keg	205.00	
	BOKB balai penyuluhan KB kec. Kakas	Kecamatan	Terpeliharanya balai KB dan peningkatan kemampuan penyuluh KB	1 Keg	205	BOKB balai penyuluhan KB kec. Kakas	Kecamatan	Terpeliharanya balai KB dan peningkatan kemampuan penyuluh KB	1 Keg	205	
	BOKB balai penyuluhan KB kec. Lembean Timur	Kecamatan	Terpeliharanya balai KB dan peningkatan kemampuan penyuluh KB	1 Keg	205	BOKB balai penyuluhan KB kec. Lembean Timur	Kecamatan	Terpeliharanya balai KB dan peningkatan kemampuan penyuluh KB	1 Keg	205	
	BOKB balai penyuluhan KB kec. Eris	Kecamatan	Terpeliharanya balai KB dan peningkatan kemampuan penyuluh KB	1 Keg	205	BOKB balai penyuluhan KB kec. Eris	Kecamatan	Terpeliharanya balai KB dan peningkatan kemampuan penyuluh KB	1 Keg	205	



	BOKB balai penyuluhan KB kec. Tombulu	Kecamatan	Terpeliharanya balai KB dan peningkatan kemampuan penyuluh KB	1 Keg	205.00	BOKB balai penyuluhan KB kec. Tombulu	Kecamatan	Terpeliharanya balai KB dan peningkatan kemampuan penyuluh KB	1 Keg	205.00	
	BOKB balai penyuluhan KB kec. Kakas Barat	Kecamatan	Terpeliharanya balai KB dan peningkatan kemampuan penyuluh KB	1 Keg	205	BOKB balai penyuluhan KB kec. Kakas Barat	Kecamatan	Terpeliharanya balai KB dan peningkatan kemampuan penyuluh KB	1 Keg	205	
	BOKB balai penyuluhan KB kec. Langowan Utara	Kecamatan	Terpeliharanya balai KB dan peningkatan kemampuan penyuluh KB	1 Keg	205	BOKB balai penyuluhan KB kec. Langowan Utara	Kecamatan	Terpeliharanya balai KB dan peningkatan kemampuan penyuluh KB	1 Keg	205	
	BOKB balai penyuluhan KB kec. Kawagkoan barat	Kecamatan	Terpeliharanya balai KB dan peningkatan kemampuan penyuluh KB	1 Keg	205	BOKB balai penyuluhan KB kec. Kawagkoan barat	Kecamatan	Terpeliharanya balai KB dan peningkatan kemampuan penyuluh KB	1 Keg	205	
	Dukungan komunikasi, informasi dan Manajemen	Kecamatan	Tersedianya media dukungan komunikasi, informasi dan manajemen	1 Keg	245	Dukungan komunikasi, informasi dan Manajemen	Kecamatan	Tersedianya media dukungan komunikasi, informasi dan manajemen	1 Keg	245	
	BOKB balai penyuluhan KB kec. Mandolang	Kecamatan	Terpeliharanya balai KB dan peningkatan kemampuan penyuluh KB	1 Keg	205	BOKB balai penyuluhan KB kec. Mandolang	Kecamatan	Terpeliharanya balai KB dan peningkatan kemampuan penyuluh KB	1 Keg	205	
	BOKB balai penyuluhan KB kec. Remboken	Kecamatan	Terpeliharanya balai KB dan peningkatan kemampuan penyuluh KB	1 Keg	205	BOKB balai penyuluhan KB kec. Remboken	Kecamatan	Terpeliharanya balai KB dan peningkatan kemampuan penyuluh KB	1 Keg	205	
	BOKB Kampung KB Kec. Langowan Selatan	Kecamatan	Terlaksananya kegiatan KKBPKn di Kampung KB	1 Keg	110	BOKB Kampung KB Kec. Langowan Selatan	Kecamatan	Terlaksananya kegiatan KKBPKn di Kampung KB	1 Keg	110	
	BOKB Kampung KB Kec. Langowan Timur	Kecamatan	Terlaksananya kegiatan KKBPKn di Kampung KB	1 Keg	110	BOKB Kampung KB Kec. Langowan Timur	Kecamatan	Terlaksananya kegiatan KKBPKn di Kampung KB	1 Keg	110	

	BOKB Kampung KB Kec. Tompaso	Kecamatan	Terlaksananya kegiatan KKBPKN di Kampung KB	1 Keg	110	BOKB Kampung KB Kec. Tompaso	Kecamatan	Terlaksananya kegiatan KKBPKN di Kampung KB	1 Keg	110	
	BOKB Kampung KB Kec. Tombariri	Kecamatan	Terlaksananya kegiatan KKBPKN di Kampung KB	1 Keg	110	BOKB Kampung KB Kec. Tombariri	Kecamatan	Terlaksananya kegiatan KKBPKN di Kampung KB	1 Keg	110	
	BOKB Kampung KB Kec. Tombariri Timur	Kecamatan	Terlaksananya kegiatan KKBPKN di Kampung KB	1 Keg	110	BOKB Kampung KB Kec. Tombariri Timur	Kecamatan	Terlaksananya kegiatan KKBPKN di Kampung KB	1 Keg	110	
	BOKB Kampung KB Kec. Pineleng	Kecamatan	Terlaksananya kegiatan KKBPKN di Kampung KB	1 Keg	110	BOKB Kampung KB Kec. Pineleng	Kecamatan	Terlaksananya kegiatan KKBPKN di Kampung KB	1 Keg	110	
	BOKB Kampung KB Kec. Sonder	Kecamatan	Terlaksananya kegiatan KKBPKN di Kampung KB	1 Keg	110	BOKB Kampung KB Kec. Sonder	Kecamatan	Terlaksananya kegiatan KKBPKN di Kampung KB	1 Keg	110	
	BOKB Kampung KB Kec. Kombi	Kecamatan	Terlaksananya kegiatan KKBPKN di Kampung KB	1 Keg	110	BOKB Kampung KB Kec. Kombi	Kecamatan	Terlaksananya kegiatan KKBPKN di Kampung KB	1 Keg	110	
	Distribusi alat obat kontrasepsi(ALOKON)	Kecamatan	Terlaksananya distribusi alat obat kontrasepsi (ALOKON)	1 Keg	93.00	Distribusi alat obat kontrasepsi(ALOKON)	Kecamatan	Terlaksananya distribusi alat obat kontrasepsi (ALOKON)	1 Keg	93.00	
	Pembinaan program KB bagi masyarakat oleh kader (PPKBD/Sub PPKBD)	Kecamatan	Terlaksananya pembinaan program KB bagi masyarakat	12 Bulan	2100	Pembinaan program KB bagi masyarakat oleh kader (PPKBD/Sub PPKBD)	Kecamatan	Terlaksananya pembinaan program KB bagi masyarakat	12 Bulan	2100	
	BOKB balai penyuluhan KB kec. Kombi	Kecamatan	Terpeliharanya balai KB dan peningkatan kemampuan penyuluh KB	1 Keg	205	BOKB balai penyuluhan KB kec. Kombi	Kecamatan	Terpeliharanya balai KB dan peningkatan kemampuan penyuluh KB	1 Keg	205	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan didapatkan dari hasil Musrenbang maupun usulan lainnya dari masyarakat. Usulan yang datang dari masyarakat pada umumnya terkait dengan pembangunan fisik serta pengadaan sarana lainnya sebagaimana terdapat pada tabel berikut.

**Tabel. 2.5**

### **Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa**

No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
				5	
1	2	3	4	5	6
1	Program Keluarga Berencana	Kabupaten Minahasa	-Rata-rata jumlah anak per keluarga -Total Fertility Rate		
1.1	Promosi Pelayanan KHIBA	Kabupaten Minahasa	Terlaksananya Kegiatan KHIBA sehingga Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat tentang Kelangsungn Hidup Ibu, Bayi dan Anak	1 kegiatan	
1.2	Pembinaan Keluarga Berencana	Kabupaten Minahasa	Terlaksananya kegiatan HARGANAS , Ikut serta dalam kegiatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS)	1 kegiatan	
1.5	Fasilitasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB	Kabupaten Minahasa	Tersedianya Dokumen Data di Kampung KB	3 Kampung	
1.6	Pembentukan Dan Fasilitasi Sekolah Siaga Kependudukan serta Pojok Kependudukan	Kabupaten Minahasa	Terbentuknya Fasilitas Sekolah Siaga Kependudukan serta Pojok Kependudukan	3 Sekolah	
2	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Kabupaten Minahasa	-Angka kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19)per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR)		

			-Persentase Remaja terkena Infeksi Menular Seksual		
2.1	Sosialisasi Tentang Masalah Reproduksi Remaja (Pubertas)	Kabupaten Minahasa	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Tentang Masalah Reproduksi Remaja (Pubertas), Meningkatkan kesadaran remaja tentang Reproduksi	1 kegiatan	
3	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Kabupaten Minahasa	Rasio Petugas tenaga pendamping bina keluarga		
3.1	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan	Kabupaten Minahasa	Terlaksananya pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	800 Orang	
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik Pelayanan KB serta Pemerataan Akses KB yang berkualitas	Kabupaten Minahasa	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah 15-49		
4.1	Pengadaan Sarana PPKBD	Kabupaten Minahasa	Tersedianya sarana PPKBD	30 Paket	DAK Fisik
4.2	Pengadaan PKB/PLKB Kit dan KIE Kit	Kabupaten Minahasa	Tersedianya untuk PKB/PLKB Kit dan KIE Kit	1 kegiatan	DAK Fisik
4.3	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Rumah Data Kependudukan	Kabupaten Minahasa	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Rumah Data Kependudukan	1 kegiatan	DAK Fisik
4	Program Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Kabupaten Minahasa	-Cakupan Peserta KB aktif -Rasio Akseptor KB -Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi		DAK Non Fisik
4.1	BOKB Balai Penyuluhan KB (DAK Non Fisik)	18 Kecamatan	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana KB yang mendapat bantuan operasional keluarga Berencana	18 Balai Penyuluhan KB Tk. Kecamatan	Kecamatan:

					<p>Tondano Timur, Tondano Barat, Tondano Selatan, Tondano Utara, Langowan Barat, Kawangkaon, Kawangkoan Utara, Tompaso Barat, Kakas,</p> <p>Lembean Timur, Eris, Tombulu, Kakas Barat, Langowan Utara Kawangkaon Barat, Remboken, Mandolang, Kombi</p>
4.2	Dukungan Komunikasi, informasi dan manajemen	Kabupaten Minahasa	Tersedianya media dukungan komunikasi, informasi dan manajemen	1 Kegiatan	
4.3	BOKB Kampung KB	8 Kampung KB	Terlaksananya kegiatan KKBPK di kampung KB	1 Kegiatan	Kecamatan: langowan selatan, langowan Timur, Tompaso, Tombariri, Tombariri timur, Pineleng, sonder, kombi
4.4	Distribusi alat dan obat Kontrasepsi (ALOKON)	Fasyankes	Terlaksananya Distribusi alat dan obat Kontrasepsi (ALOKON)	1 Kegiatan	
4.5	Pembinaan program KB bagi masyarakat oleh kader (PPKBD/Sub PPKBD)	Kabupaten Minahasa	Tersedianya Operasional bagi (PPKBD/Sub PPKBD)	12 Bulan	

### BAB III

## TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021

### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Prioritas pembangunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Minahasa tahun 2021 yang ditetapkan selain untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan Kabupaten Minahasa juga untuk mendukung sasaran pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang ditetapkan melalui RKP BKKBN Pusat melalui Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara dan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa.

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi Program Keluarga Berencana sebagai Program Nasional sehingga kebijakan nasional yang diarahkan dan berkaitan dengan tugas pokok dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan utama meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan Program KB. Tugas dan kewenangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilakukan dengan melakukan kemitraan dengan semua elemen baik TNI, POLRI, PKK dan Masyarakat termasuk dengan lembaga pemberdayaan masyarakat. Pengembangan jaringan pelayanan KB ditujukan untuk mempercepat proses perubahan pandangan, sikap dan perilaku masyarakat yang positif terhadap program KB, yang selanjutnya harus diikuti dengan penyiapan sarana pelayanan yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Pengembangan jaringan pelayanan KB dimaksud, baik yang dikelola oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat itu sendiri. Penyiapan dan pelaksanaan pelayanan KB ditujukan untuk memberikan pelayanan prima di bidang keluarga berencana baik dari segi kuantitas maupun dari segi peningkatan kualitas pelayanan serta pemerataan pelaksanaan program keluarga berencana. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat harus memenuhi standar yang telah ditetapkan baik pelayanan bersifat subsidi maupun mandiri dengan sesuai kemampuan masyarakat dan mudah dijangkau. Peningkatan kualitas penyelenggaraan program Keluarga Berencana ditujukan untuk memperkuat dan mengembangkan manajemen kelembagaan program KB di semua tingkatan wilayah. Kuatnya jejaring KB, mantapnya mekanisme operasional yang didukung sistem pencatatan dan pelaporan secara akurat dengan Sumber Daya Manusia yang handal akan mempercepat perwujudan visi keluarga berencana.

Sasaran Strategis Untuk mencapai Tata kelola penelitian dan pengembangan bidang Keluarga Berencana, menguatkan akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas, meningkatkan pembinaan peserta KB, baik menggunakan MKJP maupun Non MKJP, meningkatnya pemahaman remaja mengenai Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. maka sasaran yang harus dicapai pada tahun 2021 yaitu :

Sasaran Strategis I Penguatan tata kelola, Penelitian dan pengembangan bidang Keluarga Berencana untuk mencapai tujuan BKKBN yang telah menetapkan sasaran strategis yaitu Menurunnya Laju pertumbuhan penduduk

Sasaran Strategis II Menguatkan akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas yaitu:

1. Menurunnya angka kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 tahun)
2. Meningkatnya Pemakaian kontrasepsi (CPR) Sasaran Strategis III
3. Peningkatan pembinaan peserta KB, baik menggunakan MKJP maupun Non MKJP

Sasaran Strategis III, yaitu

1. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need), penurunan unmet need melalui percepatan dan pemerataan akses dan kualitas pelayanan KB melalui penguatan kapasitas tenaga dan kelembagaan KB di lini lapangan, yaitu dalam rangka pembinaan dan peningkatan peserta/akseptor dan kemandirian keluarga berencana; peningkatan layanan keluarga sejahtera; promosi dan penggerakan masyarakat yang didukung dengan pengembangan dan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk; peningkatan dukungan sarana dan prasarana pelayanan program KB.
2. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun)

Sasaran Strategis IV Meningkatnya pemahaman remaja mengenai Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, yaitu: Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun)

Sedangkan arah kebijakan pembangunan Keluarga Berencana tahun 2018 adalah Revitalisasi Program KB, yang tekankan penurunan Unmet Need, Koordinasi dan Komitmen dengan sektor terkait dalam Program KB, Peningkatan Pelayanan Program KB, Peningkatan Sumber daya manusia (SDM) tenaga pengelola Program KB, Komitmen Kemitraan penyebaran informasi, Peningkatan Partisipasi Masyarakat terhadap Program KB, Pelaksanaan Kelompok Tribina,

Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif, Peningkatan Pola Operasional Kegiatan Kemitraan dalam Pelayanan KB.

Arah Kebijakan Nasional untuk Pembangunan Kependudukan dan KB adalah sebagai berikut :

1. Revitalisasi program KB, yang ditekankan penurunan unmet need melalui percepatan dan pemerataan akses dan kualitas pelayanan KB melalui penguatan kapasitas tenaga dan kelembagaan KB di lini lapangan, yaitu dalam rangka pembinaan dan peningkatan peserta/akseptor dan kemandirian keluarga berencana; peningkatan layanan keluarga sejahtera; promosi dan penggerakan masyarakat yang didukung dengan pengembangan dan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk; peningkatan dukungan sarana dan prasarana pelayanan program KB.
2. Penyerasian Kebijakan Pengendalian Penduduk, yang ditekankan pada diseminasi peraturan perundangan pengendalian penduduk; perumusan kebijakan kependudukan yang sinergis antara aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas. Disamping itu juga dilaksanakan penguatan kemitraan dengan berbagai pihak terutama dengan Perguruan Tinggi dan Pusat Studi Kependudukan.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

#### **3.2.1 Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah kepada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa mendatang. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran nyata dari perumusan visi dan misi.

Adapun Tujuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Minahasa adalah sebagai berikut :

Tujuan 1(satu) :Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk

Tujuan 2 (Dua) :Meningkatkan keluarga sejahtera

Tujuan 3 (Tiga) : Meningkatkan Tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik



### 3.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Adapun fokus utama dari sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya baik manusia, prasarana dan sarana yang ada dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang, namun harus dapat dicapai serta berorientasi pada hasil. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa menetapkan sasaran serta indikator yang menjadi tolak ukurannya sebagai berikut :

Sasaran I : Mengendalikan angka kelahiran

1. Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas
2. Meningkatkan akses pelayanan KB yang merata dan berkualitas
3. Meningkatkan avokasi, komunikasi informasi edukasi (KIE) serta kualitas tenaga penyuluh lapangan

Sasaran II : Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga

1. Meningkatkan pelayanan keluarga sejahtera

Sasaran III : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan

1. Meningkatnya penyelenggaraan administrasi yang efektif dan efisien

### 3.3 Rumusan program dan kegiatan tahun 2021

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud maka dirumuskan rencana program dan kegiatan tahun 2021 dan perkiraan maju tahun 2022, dengan rincian sebagaimana table 3.3

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2022				
			Lokasi	Target	Rp	Sumber dana		Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2	08	01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Persentase pengelolaan kegiatan, keuangan, barang, aset dan kepegawaian yang di dukung administrasi yang baik	DPPKB	97%	314,000,000			98%	346,000,000
2	08	01	01	Penyediaan Pelayanan Administrasi perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	DPPKB	97%	314,000,000	DAU		98%	346,000,000
2	08	02		<b>Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur</b>	Cakupan ketersediaan prasarana sarana aparatur sesuai rencana Kebutuhan Barang Milik	DPPKB	85%	1,138,000,000			90%	1,150,000,000
2	08	02	02	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung(DAK)	Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor	DPPKB	4 Unit	130,000,000	DAU/DAK		6 Unit	140,000,000
2	08	02	03	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	DPPKB	5 Unit	62,000,000	DAU		5 Unit	67,000,000
2	08	02	04	Rehabilitasi sedang berat gedung balai Penyuluhan KB (DAK)	Terpenuhinya gedung balai penyuluhan KB yang lebih baik	DPPKB	1 Paket	60,000,000	DAK		1 Paket	65,000,000
2	08	02	05	Rehabilitasi sedang berat gedung kantor (DAK)	Terpenuhinya gedung kaantor yang lebih baik	DPPKB	2 Paket	110,000,000	DAK		2 Paket	120,000,000

2	08	02	03	Pembangunan gedung kantor balai penyuluhan KB(DAK)	Terlaksananya pembangunan balai penyuluhan KB di setiap kecamatan	DPPKB	2 Gedung	780,000,000	DAK		2 Gedung	800,000,000
2	08	03		<b>Program Peningkatan disiplin aparatur</b>	Presentase Kehadiran Pegawai sesuai jam kerja	DPPKB	96%	46,000,000			98%	51,000,000
					Presentase kehadiran pegawai pada kegiatan khusus serta hari tertentu		97%				97%	
2	08	03	01	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	DPPKB	35 Paket	35,000,000	PAD			
2	08	05		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur</b>	Presentase Pejabat yang memiliki tanda lulus diklat penjenjangan struktural	Badan Diklat Propinsi	25%	16,000,000			35%	16,000,000
					Presentase Pejabat yang tanda lulus pembekalan pelaksanaan tugas teknis		35%				45%	
2	08	05	01	Pendidikan dan latihan PIM IV	Jumlah pejabat yang mengikuti diklat penjenjangan PIM IV	Badan Diklat Propinsi	1 Orang	16,000,000	PAD		1 Org	16,000,000
2	08	06		<b>Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kerja dan keuangan</b>	Cakupan laporan capaian kinerja keuangan yang tersedia tepat waktu	DPPKB	100%	16,000,000			100%	16,000,000
2	08	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan	DPPKB	1 Keg	4,000,000	DAU		1 Keg	5,000,000
2	08	06	02	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	DPPKB	1 Keg	4,000,000	DAU		1 Keg	5,000,000

2	8	7		<b>Program Perencanaan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah yang ditetapkan	DPPKB	3 Dokumen	5,000,000			2 Dokumen	4,000,000
2	08	07	01	Penyusunan renstra dan renja	Tersusunnya Renstra dan Renja	DPPKB	2 Dok	3,000,000	DAU		2 Dokumen	4,000,000
2	8	15		<b>Program Keluarga Berencana</b>	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Kecamatan	2,04	605,000,000			2,02	711,000,000
					Total Fertility Rate (TFR)		2,08				2,09	
2	08	15	01	Promosi pelayanan Khiba	Terlaksananya kegiatan promosi Khiba	Kecamatan	1 Keg	45,000,000	DAU		1 Keg	50,000,000
2	08	15	02	Hari keluarga nasional	Mengikuti kegiatan hari keluarga nasional	Kecamatan	1 Keg	375,000,000	DAU		1 Keg	380,000,000
2	08	15	03	Pembentukan rumah data kependudukan dikampung KB	Tersedianya kependudukan dikampung KB	Kecamatan	3 Keg	15,000,000	DAU		4 Keg	20,000,000
2	08	15	04	Pembentukan sekolah siaga kependudukan serta pojok kependudukan	Terbentuknya fasilitas sekolah siaga dan pojok kependudukan tiap kecamatan	Kecamatan	3 Keg	15,000,000	DAU		4 Keg	20,000,000
2	8	16		<b>Program Kesehatan Reproduksi Remaja</b>	Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Kecamatan	30	61,000,000			2800%	67,000,000
					Presentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)		0,1				0,09	
2	08	16	01	Sosialisasi tentang masalah reproduksi remaja	Terlaksananya kegiatan sosialisasi masalah reproduksi remaja	Kecamatan	1 Keg	30,000,000	DAU		1 Keg	35,000,000
2	8	23		<b>Program penyiapan tenaga pendamping Kelompok bina keluarga</b>	Rasio petugas pendamping bina keluarga	Kecamatan	1,35	60,000,000			1,1	66,000,000
					Terlaksananya pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga		800 Orang				1000 Org	

2	08	23	01	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	terlaksananya pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Kecamatan	800 Org	60,000,000	DAU		1000 Org	66,000,000
2	8	31		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik Pelayanan KB serta Pemerataan Akses KB yang Berkualitas</b>	Angka pemakaian kontrasepsi /CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	Kecamatan	0,4%	261,000,000			0,4%	264,000,000
2	08	31	01	Pengadaan sarana PPKBD(DAK)	Terlaksananya pengadaan sarana PPKBD (DAK)	Kecamatan	30 Paket	150,000,000	DAK		30 Paket	160,000,000
2	08	31	02	Pengadaan PKB/PLKB kit dan KIE kit (DAK)	Terlaksananya pengadaan PKB/PLKB Kit dan KIE Kit (DAK)	Kecamatan	8 Paket	40,000,000	DAK		10 Paket	44,000,000
2	08	31	03	Pengadaan sarana dan prasarana rumah data kependudukan	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana rumah data kependudukan	Kecamatan	4 Unit	54,000,000	DAK		6 Unit	72,000,000
2	8	32		<b>Program Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)</b>	Cakupan Peserta KB Aktif	Kecamatan	77%	7,489,000,000			78%	8,523,000,000
			Rasio Akseptor KB		77%		77%					
			Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi		8,06%		7,82%					
2	08	32	01	BOKB balai penyuluhan KB kec. Tondano Timur	Terpeliharanya balai KB dan peningkatan kemampuan penyuluh KB	Kecamatan	1 Keg	205,000,000	DAK NON FISIK BOKB		1 Keg	210,000,000
2	08	32	02	BOKB balai penyuluhan KB kec. Tondano Barat	Terpeliharanya balai KB dan peningkatan kemampuan penyuluh KB	Kecamatan	1 Keg	205,000,000	DAK NON FISIK BOKB		1 Keg	210,000,000
2	08	32	03	BOKB balai penyuluhan KB kec. Tondano Utara	Terpeliharanya balai KB dan peningkatan kemampuan penyuluh KB	Kecamatan	1 Keg	205,000,000	DAK NON FISIK BOKB		1 Keg	210,000,000

2	08	32	04	BOKB balai penyuluhan KB kec. Tondano Selatan	Terpeliharanya balai KB dan peningkatan kemampuan penyuluh KB	Kecamatan	1 Keg	205,000,000	DAK NON FISIK BOKB	1 Keg	210,000,000
2	08	32	05	BOKB balai penyuluhan KB kec. Langowan Barat	Terpeliharanya balai KB dan peningkatan kemampuan penyuluh KB	Kecamatan	1 Keg	205,000,000	DAK NON FISIK BOKB	1 Keg	210,000,000
2	08	32	06	BOKB balai penyuluhan KB kec. Kawangkoan	Terpeliharanya balai KB dan peningkatan kemampuan penyuluh KB	Kecamatan	1 Keg	205,000,000	DAK NON FISIK BOKB	1 Keg	210,000,000
2	08	32	07	BOKB balai penyuluhan KB kec. Kawangkoan Utara	Terpeliharanya balai KB dan peningkatan kemampuan penyuluh KB	Kecamatan	1 Keg	205,000,000	DAK NON FISIK BOKB	1 Keg	210,000,000
2	08	32	08	BOKB balai penyuluhan KB kec. Tompasso Barat	Terpeliharanya balai KB dan peningkatan kemampuan penyuluh KB	Kecamatan	1 Keg	205,000,000	DAK NON FISIK BOKB	1 Keg	210,000,000
2	08	32	09	BOKB balai penyuluhan KB kec. Kakas	Terpeliharanya balai KB dan peningkatan kemampuan penyuluh KB	Kecamatan	1 Keg	205,000,000	DAK NON FISIK BOKB	1 Keg	210,000,000
2	08	32	10	BOKB balai penyuluhan KB kec. Lembean Timur	Terpeliharanya balai KB dan peningkatan kemampuan penyuluh KB	Kecamatan	1 Keg	205,000,000	DAK NON FISIK BOKB	1 Keg	210,000,000
2	08	32	11	BOKB balai penyuluhan KB kec. Eris	Terpeliharanya balai KB dan peningkatan kemampuan penyuluh KB	Kecamatan	1 Keg	205,000,000	DAK NON FISIK BOKB	1 Keg	210,000,000
2	08	32	12	BOKB balai penyuluhan KB kec. Tombulu	Terpeliharanya balai KB dan peningkatan kemampuan penyuluh KB	Kecamatan	1 Keg	205,000,000	DAK NON FISIK BOKB	1 Keg	210,000,000
2	08	32	13	BOKB balai penyuluhan KB kec. Kakas Barat	Terpeliharanya balai KB dan peningkatan kemampuan penyuluh KB	Kecamatan	1 Keg	205,000,000	DAK NON FISIK BOKB	1 Keg	210,000,000
2	08	32	14	BOKB balai penyuluhan KB kec. Langowan Utara	Terpeliharanya balai KB dan peningkatan kemampuan penyuluh KB	Kecamatan	1 Keg	205,000,000	DAK NON FISIK BOKB	1 Keg	210,000,000
2	08	32	15	BOKB balai penyuluhan KB kec. Kawagkoan barat	Terpeliharanya balai KB dan peningkatan kemampuan penyuluh KB	Kecamatan	1 Keg	205,000,000	DAK NON FISIK BOKB	1 Keg	210,000,000
2	08	32	16	Dukungan komunikasi, informasi dan Manajemen	Tersedianya media dukungan komunikasi, informasi dan manajemen	Kecamatan	1 Keg	245,000,000	DAK NON FISIK BOKB	1 Keg	250,000,000
2	08	32	17	BOKB balai penyuluhan KB kec. Mandolang	Terpeliharanya balai KB dan peningkatan kemampuan penyuluh KB	Kecamatan	1 Keg	205,000,000	DAK NON FISIK BOKB	1 Keg	210,000,000

2	08	32	18	BOKB balai penyuluhan KB kec. Remboken	Terpeliharanya balai KB dan peningkatan kemampuan penyuluh KB	Kecamatan	1 Keg	205,000,000	DAK NON FISIK BOKB		1 Keg	210,000,000
2	08	32	19	BOKB Kampung KB Kec. Langowan Selatan	Terlaksananya kegiatan KKBPKn di Kampung KB	Kecamatan	1 Keg	110,000,000	DAK NON FISIK BOKB		1 Keg	112,000,000
2	08	32	20	BOKB Kampung KB Kec. Langowan Timur	Terlaksananya kegiatan KKBPKn di Kampung KB	Kecamatan	1 Keg	110,000,000	DAK NON FISIK BOKB		1 Keg	112,000,000
2	08	32	21	BOKB Kampung KB Kec. Tompaso	Terlaksananya kegiatan KKBPKn di Kampung KB	Kecamatan	1 Keg	110,000,000	DAK NON FISIK BOKB		1 Keg	112,000,000
2	08	32	22	BOKB Kampung KB Kec. Tombariri	Terlaksananya kegiatan KKBPKn di Kampung KB	Kecamatan	1 Keg	110,000,000	DAK NON FISIK BOKB		1 Keg	112,000,000
2	08	32	23	BOKB Kampung KB Kec. Tombariri Timur	Terlaksananya kegiatan KKBPKn di Kampung KB	Kecamatan	1 Keg	110,000,000	DAK NON FISIK BOKB		1 Keg	112,000,000
2	08	32	24	BOKB Kampung KB Kec. Pineleng	Terlaksananya kegiatan KKBPKn di Kampung KB	Kecamatan	1 Keg	110,000,000	DAK NON FISIK BOKB		1 Keg	112,000,000
2	08	32	25	BOKB Kampung KB Kec. Sonder	Terlaksananya kegiatan KKBPKn di Kampung KB	Kecamatan	1 Keg	110,000,000	DAK NON FISIK BOKB		1 Keg	112,000,000
2	08	32	26	BOKB Kampung KB Kec. Kombi	Terlaksananya kegiatan KKBPKn di Kampung KB	Kecamatan	1 Keg	110,000,000	DAK NON FISIK BOKB		1 Keg	112,000,000
2	08	32	27	Distribusi alat obat kontrasepsi(ALOKON)	Terlaksananya distribusi alat obat kontrasepsi (ALOKON)	Kecamatan	1 Keg	93,000,000	DAK NON FISIK BOKB		1 Keg	94,000,000
2	08	32	28	Pembinaan program KB bagi masyarakat oleh kader (PPKBD/Sub PPKBD)	Terlaksananya pembinaan program KB bagi masyarakat	Kecamatan	1 Keg	2,100,000,000	DAK NON FISIK BOKB		1 Keg	2,150,000,000
2	08	32	29	BOKB balai penyuluhan KB kec. Kombi	Terpeliharanya balai KB dan peningkatan kemampuan penyuluh KB	Kecamatan	1 Keg	205,000,000	DAK NON FISIK BOKB		1 Keg	210,000,000





## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Minahasa merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Minahasa 2018–2023 dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Dinas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Kabupaten Minahasa dalam pelaksanaan kegiatan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan untuk mewujudkan pembangunan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam renja 2021 dan kebijakan umum APBD. Prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2021 benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Disamping itu seluruh satker mulai membuat rencana aksi dalam upaya penggalan dan memobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan.

Pelaksanaan Kegiatan renja harus dilakukan secara efektif dan efisien, untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar perangkat daerah dengan kabupaten/kota maupun perangkat daerah dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah di programkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan prinsip *safe guarding* akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luar dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan factor terpenting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan.

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktifitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (Output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Rencana program maupun kegiatan Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana tahun 2020 berisi program dan kegiatan baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah didukung oleh pendanaan(pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah (Renja PD). Rencana kerja berupa program dan kegiatan sebagai instrument pelaksanaan dari program perangkat daerah tahun 2021 dan prakiraan maju tahun 2022 disajikan pada table 3.3 diatas. Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan RKPD tahun 2021 yang sudah ditetapkan.

## BAB V

### PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa Tahun 2021 ini disusun sebagai pedoman kerja yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan, dan disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa 2018 – 2023. Dengan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) ini diharapkan akan lebih mudah untuk dapat mengendalikan Pelaksanaan Pembangunan, Khususnya Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa tahun 2021 merupakan Rencana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melanjutkan RENSTRA DPPKB Tahun 2018-2023 serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa. Rencana Kerja Tahun 2021 dimaksudkan guna mewujudkan visi, misi, kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa Tahun 2021 sesuai dengan Renstra Tahun 2018-2023.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa Tahun 2021 kami susun untuk dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam upaya pengambilan kebijakan serta sebagai bahan acuan kami untuk program kegiatan di tahun 2021. Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa diharapkan prioritas pembangunan Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana sebagai penjabaran Visi dan Misi Kabupaten Minahasa dapat lebih sinergis dan optimal dalam mencapai sasaran yang telah direncanakan.

Semoga upaya – upaya kita dalam meningkatkan kinerja untuk ikut membangun bangsa dan negara, khususnya pemerintah Kabupaten Minahasa dapat terlaksana dengan segala baik.

**Kepala Dinas PPKB  
Kabupaten Minahasa**



**RIANY S. SUWARNO**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680414 198902 2 006